



BAB I

Pendahuluan

1.1. Informasi Umum.

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD di Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan program dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu “ **Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Misi sebagaimana yang telah ditetapkan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada point 4 “**Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah**”.

Adapun Tujuan, Saran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021, adalah **Meningkatnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri**”

B. Sasaran

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat

Selama masa periode RPJMD tahap kedua (2016-2021), adalah sebagai berikut :



1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial
4. Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin

C. Strategi

1. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
2. Perluasan dan jangkauan pemberian bantuan PMKS.
3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS.
4. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga.
5. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

D. Kebijakan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana



dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
 - c. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan ke-butuhan dasar minimal.



Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2016 – 2021 diarahkan untuk :

1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok / komunitas maupun masyarakat.
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.
3. Membuat aturan khusus tentang Standar Pelayanan oleh LKS.
4. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Pengembangan perlindungan dan jaminan sosial serta strategi pendayagunaan sumber dana sosial.
6. Pengelolaan Sumber Dana Sosial untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem



pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2019. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21



tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 .
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 82 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang



dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan
- 1.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yangtelah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset



- 5.2.2. Kewajiban
- 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Tujuan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya, antara lain meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, dimana sasaran program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas yang Memadai bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Tersedianya perumahan yang layak bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).
4. Penataan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkompentensi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, maka Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan kepada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2019 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat salah satu Dinas yang tidak mempunyai pendapatan

sesuai peraturan yang ditetapkan. Disamping hal tersebut juga tidak mempunyai pendapatan yang lain-lain yang dianggap sah.

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran yang dilaksanakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing- masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada Program dan Kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatnya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja Program dan Kegiatan.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Adapun sasaran yang akan dicapai dari peningkatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dalam tahun 2019, adalah :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial.
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak terlantar serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial anak terlantar.
3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Penyandang Cacat dan eks trauma melalui Bimbingan dan Pelatihan, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial penyandang cacat trauma.



4. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang masalah sosial jompo / lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat serta penyandang tuna sosial.
5. Meningkatnya kemampuan bagi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya),
6. Tersosialisasikannya kegiatan-kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Sumatera barat.
7. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Fakir Miskin, Keluarga Rentan, Komunitas Adat Terpencil, Korban Tindak kekerasan dan Pekerja Migran, serta terpenuhinya kebutuhan dasar (kebutuhan beras) bagi anak panti asuhan swasta.
8. Terpeliharanya Monumen dan Taman Makan Pahlawan Kusuma Negara Padang selama tahun anggaran 2019.

Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana dalam tahun anggaran 2019 terdapat perubahan di beberapa program/kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dengan capaian target kinerja sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja
A	Program Administrasi Perkantoran terdiri dari :	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
2.	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air bersih, listrik dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD
3.	Penyediaan jasa kebersihan , pengamanan dan sopir kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor, jasa pengamanan dan sopirserta kebersihan kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
5.	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
6.	Penyediaan komponen Instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
7.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
10.	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dan 8 UPTD dengan instansi/lembaga terkait dan vertikal secara baik selama 12 bulan.
11.	Penyediaan jasa Informasi , Dokumentasi dan Publikasi	Terinformasikan dan terpublikasikannya kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan UPTD kepada masyarakat luas selama 12 bulan.
12.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terpeliharanya Kesehatan mental Spritual Aparatur Dinas Sosial dan 8 UPTD
13.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat koordinasi selama 12 bulan
B	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
1.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya pengadaan tempat tidur besi sebanyak 3 buah, tempat tidur bertingkat



		7unit, Almari Kelayan 10 unit, rak sepatu kayu 8 unit, meja makan 1 set, tempat tidur 2 unit,meja belajar 20 unit, kursi biasa 20 unit, meja staf 1 set, meja eselon IV 2 unit, kursi eselon 12 unit, kursi tamu 3 set, kursi tunggu 2 set untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
2.	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi di Dinas Sosial dan 8 UPTD sebanyak 7 unit komputer, 9 unit laptop, 13 unit printer , stabilizer 5 unit, UPS 1 unit.
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi	Terpeliharanya Alat Studio , Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang terdiri dari 1 unit telpon, 2 unit faximile, 3 unit alat musik, 3 unit handycam, 1 unit jaringan internet, 14 unit televisi, 4 unit sound system, 1 unit kamera SLR, 1 unit kamera di UPTD Dinas Sosial .
4.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor yang terdiri dari 2 gedung, 3 pembatas shaf mushalla, penggantian instalasi dan jaringan listrik, pembuatan sumur bor di UPTD Dinas Sosial dan PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak dan PSBGHI
5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Dinas Sosial dan 8 UPTD sebanyak 40 unit
6.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi sebanyak 145 unit untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD.
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor sebanyak 7 unit Dinas Sosial dan 8 UPTD.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

8.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya instalasi listrik, telepon dan air untuk Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
9	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas jabatan Dinas Sosial.
10.	Pemeliharaan Rutin /Berkala bangunan monumen dan Bangunan Sejarah	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan Sumatera Barat
11.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan 6 unit motor untuk operasional Dinas.
12.	Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan/ perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 187 unit di Dinas Sosial dan 8 UPTD
13.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pengadaan sebanyak 161 unit
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1.	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai dan PTT sebanyak 280 stel agar meningkatnya kesejahteraan Pegawai Dinas Sosial dan 8 UPTD
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai Dinas Sosial dan UPTD yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan yang terdiri dari Renja, Pra-RKA,RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPPA Dinas Sosial dan UPTD.
2.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Meningkatnya motivasi kerja Pengelola



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

		Keuangan Dinas Sosial dan 8 UPTD serta terlaksananya penatausahaan keuangan secara baik dan tertib.
3.	Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Kinerja Dinas Sosial yang terdiri dari laporan tahunan APBD, laporan tahunan APBN, LAKIP, LKPJ dan LPPD secara tertib, lancar dan berkala selama 12 bulan
4.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan di Kab/Kota
5.	Penyusunan Sinergitas Program antar Kabupaten/Kota	Terjalannya sinergitas program/kegiatan antara Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kab/Kota.
6.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, pengendalian asset dan Honorarium Pengelola Aset Dinas Sosial dan 8 UPTD dengan baik.
G	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
1.	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya koordinasi dan pengiriman Penyandang Disabilitas untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial terhadap klien PMKS dari Prov. Sumbar.
2.	Sosialisasi program Penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH)	Terlaksana dan terjalannya koordinasi antar penanganan ABH dengan pihak terkait dan stake holder.
3.	Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)	Terlaksananya sosialisasi unit institusi layanan sosial (UILS) sebanyak 60 orang
4.	Bimbingan teknis satuan bhakti pekerja sosial.	Terpenuhi dan terlaksananya bimbingan teknis bagi sakti peksos sebanyak 50 orang.
H	Program Pembinaan Anak Terlantar	
1.	Pengadaan kelengkapan Klien	Terpenuhinya kelengkapan klien di UPTD



		PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 355 orang (155 orang laki-laki, 200 orang perempuan)
2.	Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	Terlaksananya seleksi penerimaan calon kelayan di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang, PSAA Tri Murni, PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 65 orang.
3.	Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak	Terjalinnnya koordinasi antar pengurus panti sosial swasta dengan Dinas Sosial Kab/Kota dan Instansi terkait tentang rehabilitasi sosial anak.
4.	Sehari bersama Anak	Meningkatnya kepedulian orang tua dan masyarakat terhadap anak
5.	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam izin pengangkatan anak
6.	Pelatihan keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi Anak terlantar melalui UPTD PSAABR Lubuk Alung	Meningkatnya keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar untuk melakukan usaha kerja melalui UPTD PSAABR Lubuk Alung sebanyak 160 orang
7.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 75 orang
8.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi Anak Terlantar PSBR Harapan Padang Panjang	Terlaksana dan terpenuhinya keterampilan anak terlantar di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 200 orang
9.	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak asuh di panti Tri Murni Padang Panjang sebanyak 100 orang (perempuan)



10.	Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	Terpenuhinya biaya pendidikan klien anak asuh di UPTD Tri Murni Padang Panjang sebanyak 100 orang (perempuan)
11.	Penyediaan bahan Obat-obatan dan dokter Pakai Habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan klien di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang dan PSAA Tri Murni Padang Panjang selama 12 bulan
12.	Penyediaan Bahan Pendidikan (Budi Utama)	Terpenuhinya bahan pendidikan kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 75 orang
13.	Pengadaan Makan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSBR Harapan Padang Panjang, dan PSAA Tri Murni selama 12 bulan sebanyak 355 orang (155 laki-laki, 200 perempuan)
I	Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma	
1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Dissabilitas	Terlaksana dan terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang Dissabilitas di PSBN Tuah Sakato Padang sebanyak 50 orang (36 laki-laki, 14 perempuan)
2.	Biaya Makan dan Minum Kelayan.	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kelayan penyandang cacat di UPTD PSBN Tuah Sakato dan PSBGHI Padang sebanyak 150 orang (92 orang laki-laki, 58 orang perempuan) selama 12 bulan.
3.	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan klien di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang selama 12 bulan.



4.	Biaya kelengkapan kelayan	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan di PSBN Tuah Sakato Padang dan PSBGHI Padang sebanyak 150 orang (92 orang laki-laki, 58 orang perempuan) selama 12 bulan.
5.	Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas	Meningkatnya kemandirian serta keberfungsian Sosial penyandang Disabilitas yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi melalui UPTD PSBGHI Padang sebanyak 100 orang (50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan). Dan 600 Orang
6.	Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	Meningkatnya pengetahuan PSM/TKSK dalam rangka mendampingi penyandang Disabilitas di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 68 orang.
7.	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas.
8.	Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Kaya (LBK)	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan terhadap penyandang disabilitas melalui LBK sebanyak 15 orang.
9.	Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang Peduli Pada Penyandang Disabilitas	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi tokoh yang peduli kepada penyandang disabilitas sebanyak 54 orang.
J	Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	
1.	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	Meningkatnya kemandirian lanjut usia yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan Kasih Sayang Ibu Batu Sangkarsebanyak 180 orang (106 laki-laki, 74 perempuan).
2.	Biaya Kelengkapan Klien di Panti	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kelayan



	Jompo	lanjut usia di PSTW Kasih Sayang Ibu dan Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak 180 orang (106 laki-laki, 74 perempuan).
3.	Biaya Makan dan Minum Klien di Panti Jompo	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum kelayan Jompo di PSTW Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar dan Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak 180 orang (106 laki-laki, 74 perempuan).
4.	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter pakai habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu Bt.Sangkar dan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin selama 12 bulan
5.	Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien	Terlaksananya Pemakaman dan Pemulangan kelayan di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan Kasih Sayang Ibu Batu Sangkar selama 12 bulan
6.	Lanjut Usia Berkreasi	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia sebanyak 250 orang.
K	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial lainnya)	
1.	Pengadaan Kelengkapan (biaya klien)	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan klien di UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok sebanyak 40 orang
2.	Biaya Obat-obatan dan Dokter pakai Habis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok selama 12 Bulan
3.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyakit Sosial	Meningkatnya keterampilan klien yang telah mendapatkan pendidikan dan keterampilan eks penyandang penyakit sosial di PSKW Andam Dewi Solok sebanyak 40 orang.
4.	Pengadaan Makan dan Minum	Terpenuhinya kebutuhan Makan dan Minum



		klien di PSKW Andam Dewi Solok sebanyak 40 orang.
L	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
1.	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se Sumbar dalam rangka Akreditasi	Termotivasinya pengurus Organisasi Sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan kesiapan akreditasi sebanyak 50 orang
2.	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Terinformasikannya program pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui berbagai media.
3.	Bimbingan bagi Pengurus Orsos Se-Sumatera Barat	Termotifasinya pengurus Organisasi Sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 50 orang
4.	Penilaian PSKS (KT, Orsos, PSM, TKSK berprestasi Tingkat Sumatera Barat	Terlaksananya penilaian PSKS berprestasi sehingga termotifasinya para PSKS untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 32 orang
5.	KSN Expo dan Awards dalam HKS	Terpublikasikannya kepada masyarakat umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan dan terjalinnnya koordinasi dengan mitra kerja pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial
6.	Penguatan Nilai-nilai KSN	Terlaksana dan terwujudnya penguatan Nilai-Nilai KSN Tingkat Provinsi
7.	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota	Meningkatnya motivasi dan kemampuan pengurus LKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam membina dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sosial sebanyak 180 orang.



8.	Penguatan peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	Termotivasinya LKS posdaya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan Kesos sebanyak 640 orang
9.	Bimbingan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial (TKSK) se Sumatera Barat	Termotivasinya TKSK untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 50 orang
10.	Forum komunikasi pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termotifasi pengurus Karang taruna untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 50 orang
11.	Bimbingan kapasitas bagi pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	Termotifasinya pengurus Karang Taruna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 1811 orang
12.	Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	Terinformasikannya program pembangunan Kesejahteraan Sosial kepada pekerja sosial masyarakat sebanyak 50 orang
13.	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PSM dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial sebanyak 165 orang
14.	Penguatan Peran Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Termotivasinya LKKS dan LKS untuk meningkatkan jaringan kerja dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebanyak 180 orang
15.	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Terinformasikannya program pembangunan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sebanyak 681 orang
M	Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	
1.	Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis	Meningkatnya pemahaman tentang Undian



	(UGB)	Gratis Berhadiah (UGB) sebanyak 25 orang
2.	Survey Kepuasan Masyarakat	Terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
3.	Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	Terlaksananya persiapan calon pahlawan daerah sebanyak 3 orang
4.	Sumbar Expo (Publikasi)	Terinformasikan dan Terpublikasikannya Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kepada Masyarakat Luas
5.	Bimbingan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Meningkatnya kesejahteraan keluarga rentan dan Wanita Usaha Bersama Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 15.890 orang
6.	Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS	Tersediannya buku data PMKS dan PSKS Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
7.	Pelayanan orang terlantar	Meningkatnya peran paguyuban dan pemulangan orang terlantar sebanyak 38 orang.
8.	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan berusaha warga Komunitas Adat Terpencil dalam mengembangkan usahanya sebanyak 30 KK warga KAT di Kab.Kepulauan Mentawai
9.	Penetapan calon lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Adanya rekomendasicalon lokasi pemberdayaan KAT.
10.	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3.	Meningkatkan pengetahuan dan Profesionalisme pengurus LK3 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di 19 kab/kota sebanyak 50 orang pengurus
11.	Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas Pendata PMKS	Meningkatnya kapasitas petugas pendata PMKS dan PSKS di Sumatera Barat sebanyak 96



		orang
N	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	
1.	Peningkatan Capacity Building Pendamping Program	Meningkatnya kinerja pendamping dalam kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebanyak 76 orang pendamping PKH Kab/Kota
2.	Pemantapan Tim Psikososial bencana Alam	Meningkatnya pemahaman Tim Psikososial Bencana Alam sebanyak 50 orang
3.	Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Meningkatnya pemahaman Tim Reaksi Cepat Bencana Alam sebanyak 50 orang
4.	Rakor Bencana Sosial	Meningkatnya peran, tugas dan tanggungjawab ASN dalam menangani bencana sosial kabupaten/Kota sebanyak 59 orang
5.	Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Rapat Koordinator PKH dan terlaksananya monitoring kegiatan PKH di Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 35 orang koordinator pendamping PKH dan operator Kab/Kota
6	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Meningkatnya pemahaman petugas Penanganan Bencana Sosial sebanyak 45 orang petugas Dinas Sosial
7.	Bantuan Logistik Bencana	Terlaksananya pengadaan bantuan Logistik Bencana Alam
8.	Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Sinergitas Supervisor, Koordinator dan Operator sebagai Pelaksanaan PKH di Kabupaten/Kota
9.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	Meningkatnya pemahaman petugas Penanganan Bencana Alam sebanyak 60 orang



		petugas Dinas Sosial
O	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	
1.	Pengadaan beras untuk Panti Swasta	Terpenuhinya pemberian bantuan beras bagi kelayan dalam panti sosial swasta se Sumbar sebanyak 4000 orang.
2.	Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pendamping dalam mendampingi Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT) sebanyak 60 orang.
3.	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat fakir miskin yang menjadi anggota KUBE sebanyak 38 orang pengurus dan pendamping KUBE
4.	Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan sebanyak 8 kelompok
5.	Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok melalui E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM sebanyak 7 kelompok Kota Solok, 140 kelompok Kab.Pasbar dan 20 kelompok Kab.Pasaman
6.	Bantuan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok melalui Kelompok Usaha bersama (KUBE) sebanyak 730 KK/ 73 kelompok dengan lokasi di : Kab.Padang Pariaman , Kab. Agam Kab.Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab Tanah Datar
7.	Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	Meningkatnya Kemampuan Pendamping KUBE FM Pedesaan sebanyak 50 orang
8.	Rapat Koordinasi, Monitoring dan	Terlaksananya Koordinasi Program dan



	Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA tahun 2019	Kegiatan BNTN/RASTRA Provinsi dengan Tim Koordinasi BPNT/RASTRA Kab/Kota se-Sumbar sebanyak 50 orang Tim Koordinasi Program dan Kegiatan BNTN/RASTRA KUBE Sumatera Barat
9.	Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	Meningkatnya Kemampuan Petugas Verifikasi dan Validasi BDT Kab/kota peserta 57 orang
10.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Petugas Verifikasi BDT di 19 Kab/Kota sebanyak 57 orang
P	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	
1.	Bimbingan pelatihan keterampilan dan bimbingan sosial korban NAPZA/HIV	Meningkatnya pengetahuan dan fungsi sosial eks korban Napza dalam mengembangkan usaha sebanyak 20 orang
2.	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penangan HIV bagi PSKS	Meningkatnya pengetahuan PSKS tentang penanggulangan narkoba dan penyandang masalah sosial sebanyak 150 orang penyuluh narkoba dan 57 orang bimtek HIV
3.	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	Meningkatnya pengetahuan peserta tentang pelaksanaan rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial korban Penyalah-gunaan Napza sebanyak 55 orang.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pada Tahun anggaran 2019 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana sebesar **Rp.121.668.189.819,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 21.877.288.419,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 99.790.901.400,-**.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sampai dengan bulan Desember tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari total pagu sebesar **Rp.121.668.189.819,-** terealisasi sampai akhir Desember 2019 sebesar **Rp. 113.382.675.807,-** atau sebesar **93,19 %**. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja	Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Tidak Langsung	21.877.288.419,-	21.157.721.466,-	96,71
2	Belanja Langsung	99.790.901.400,-	92.224.954.341,-	92,42
	Jumlah.....	121.668.189.819,-	113.382.675.807,-	93,19

Berdasarkan Jenis Belanja dapat dilihat realisasinya sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah		Realisasi
-	Belanja Pegawai	Rp.	21.157.721.466,-	96,71 %
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	78.621.646.722,-	92,42%
-	Belanja Hibah	Rp.	11.227.079.800,-	95,17%
-	Belanja Modal	Rp.	2.376.227.819,-	97,23%
	Jumlah	Rp.	113.382.675.807,-	93,19%

Secara total target realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sudah memakai prinsip 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis).



3.2. Belanja Daerah

Dari total dana sebesar **Rp.121.668.189.819,-** semuanya merupakan dana yang diperuntukan untuk belanja daerah, yang terdiri dari :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 21.877.288.419,-	Rp. 21.157.721.466,-	94,71
1.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 14.276.973.466,-	Rp.13.725.348.337,-	96,14
2.	Tambahan Penghasilan	Rp. 7.600.314.953,-	Rp. 7.432.373.129,-	97,79
II.	Belanja Langsung	Rp. 99.790.901.400,-	Rp. 92.224.954.341,-	92,42
1.	Bel. Langsung Umum	Rp.10.264.495.225,-	Rp. 9.833.037.797,-	95,80
2.	Belanja Langsung Wajib	Rp 89.526.406.175,-	Rp.82.391.916.544,-	92,03

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Pegawai	Rp. 21.877.288.419,-	Rp.21.157.721.466,-	96,71
II.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 85.550.131.900,-	Rp.78.621.646.722,-	91,90
III.	Belanja Hibah	Rp. 11.796.769.500,-	Rp. 11.227.079.800,-	95,17
IV.	Belanja Modal	Rp. 2.444.000.000,-	Rp. 2.376.227.819,-	97,23

Untuk lebih rincinya capaian target kinerja keuangan menurut program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.282.494.196,-	5.048.320.246,-	95,57
1	Penyediaan jasa surat menyurat	109.055.140,-	108.978.940,-	99,93
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	896.379.960,-	712.302.669,-	79,46
3	Penyediaan jasa kebersihan , pengamanan dan sopir kantor	2.366.336.600,-	2.347.851.949,-	99,22
4	Penyediaan alat tulis kantor	162.111.748,-	161.747.758,-	99,78
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.746.600,-	95.723.150,-	99,98
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	149.488.070,-	149.138.218,-	99,77
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	338.038.200,-	332.027.190,-	98,22
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	58.216.000,-	57.416.000,-	98,63
9	Penyediaan bahan logistik kantor	335.894.884,-	324.648.140,-	96,65
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	464.902.973,-	464.208.232,-	99,85
11	Penyediaan Jasa Informasi, dokumentasi dan Publikasi	37.770.021,-	34.590.000,-	91,58
12	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	97.422.000,-	91.402.000,-	93,82
13	Penyediaan makanan dan minuman	171.132.000,-	168.286.000,-	98,34
B	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.381.311.384,-	3.258.821.141,-	96,38
1	Pengadaan meubelir	216.000.000,-	215.350.455,-	99,70
2	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	247.000.000,-	244.378.950,-	98,94
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, alat komunikasi dan alat informasi	12.450.000,-	12.450.000,-	100
4	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	419.040.000,-	417.274.320,-	99,58



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	419.071.584,-	371.182.522,-	88,57
6	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	76.510.000,-	76.469.353,-	99,95
7	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	1.148.000.000,-	1.126.682.000,-	98,14
8	Pemeliharaan rutin/berkalainstalasi dan jaringan	76.913.000,-	74.340.540,-	96,66
9	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	22.550.000,-	15.221.087,-	67,50
10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	275.000.000,-	245.068.250,-	89,12
11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	349.460.800,-	344.715.664,-	98,64
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	52.796.000,-	49.168.000,-	93,13
13	Pemeliharaan rutin/berkala monumen dan Bangunan Sejarah	66.520.000,-	66.520.000,-	100
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	151.200.000,-	122.018.900,-	80,70
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	151.200.000,-	122.018.900,-	80,70
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.266.000,-	54.359.100,-	94,92
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	57.266.000,-	54.359.100,-	94,92
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.392.223.645,-	1.349.518.410,-	96,93
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	318.265.395,-	314.632.920,-	98,86
2	Penatausahaan keuangan SKPD	583.290.250,-	575.898.650,-	98,73
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	38.051.400,-	38.051.400,-	100
4	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	132.989.050,-	132.476.202,-	99,61
5	Penyusunan sinergitas program antar kabupaten/kota	111.629.750,-	111.541.750,-	99,92
6	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	207.997.800,-	176.917.488,-	85,06
G	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	293.159.750,-	235.279.450,-	80,26
1	Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	68.120.600,-	64.368.600,-	94,49



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

2	Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)	27.063.150,-	25.783.150,-	95,27
3	Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	128.303.500,-	76.365.200,-	59,52
4	Sosialisasi Program Penangan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	69.672.500,-	68.762.500,-	98,69
H	Program Pembinaan Anak Terlantar	6.907.798.435,-	6.808.100.117,-	98,56
1	Biaya Pendidikan Klien (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	315.486.300,-	284.095.000,-	90,05
2	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	50.931.100,-	44.894.100,-	88,15
3	Pengadaan Kelengkapan Klien	924.063.625,-	906.461.500,-	98,10
4	Penyediaan obat-obatan dan dokter pakai habis	26.452.000,-	26.452.000,-	100
5	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar (PSAABR Budi Utama Lb.Alung)	549.634.652,-	546.851.600,-	99,49
6	Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	45.530.000,-	42.817.415,-	94,04
7	Penyediaan bahan pendidikan(PSAABR Budi utama Lb.Alung)	205.360.000,-	205.360.000,-	100
8	Pendidikan dan pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	250.850.000,-	250.150.000,-	99,72
9	Rapat koordinasi Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	160.536.500,-	156.474.500,-	97,47
10	Pengadaan makanan dan minuman	3.125.711.688,-	3.124.986.368,-	99,98
11	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar (PSBR Harapan)	755.780.020,-	723.897.084,-	95,78
12	Sehari bersama anak	40.441.500,-	40.441.500,-	100
13	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	457.021.050,-	455.219.050,-	99,61
I	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	3.267.522.575,-	3.206.132.993,-	98,12
1	Penyediaan bahan Obat-obatan dan dokter pakai habis	21.601.800,-	21.576.500,-	99,88
2	Rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)	113.422.850,-	112.380.350,-	99,08
3	Biaya Kelengkapan kelayan	272.755.479,-	271.760.000,-	99,64



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

4	Pemberian penghargaan bagi tokoh yang peduli pada penyandang disabilitas	83.103.000,-	76.572.900,-	92,14
5	Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	733.732.779,-	698.145.300,-	95,15
6	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	445.528.267,-	440.965.000,-	98,98
7	Penguatan motivasi penyandang disabilitas	22.130.130,-	22.130.100,-	100
8	Bimbingan sosial bagi PSM/TKSK	132.559.500,-	121.357.873,-	91,55
9	Biaya Makanan dan Minuman kelayan	1.442.688.770,-	1.441.244.907,-	99,90
J	Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	2.760.876.034,-	2.746.948.462,-	99,50
1	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Alat-alat dokter pakai habis	67.973.900,-	67.973.900,-	100
2	Biaya jasa penguburan/pemulangan klien	37.000.000,-	37.000.000,-	100
3	Lanjut usia berkreasi	40.194.600,-	40.194.600,-	100
4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti jompo	647.933.476,-	637.670.484,-	98,42
5	Biaya kelengkapan klien di Panti Jompo	395.190.420,-	393.623.600,-	99,60
6	Biaya Makanan dan Minuman klien di panti Jompo	1.572.583.638,-	1.570.485.878,-	99,87
K	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	904.957.700,-	903.682.156,-	99,86
1	Pengadaan Kelengkapan (biaya Klien)	118.600.000,-	118.600.000,-	100
2	Biaya Obat-obatan dan Dokter pakai habis	22.492.000,-	22.492.000,-	100
3	Pengadaan Makanan dan Minuman	409.364.200,-	408.168.656,-	99,71
4	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Eks Penyakit Sosial	354.501.500,-	354.421.500,-	99,98
L	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.815.873.972,-	9.307.887.224,-	86,06
1	Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	5.980.745.000,-	5.422.089.600,-	90,66
2	Penilaian PSKS (Karang Taruna ,Orsos, PSM,TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat	87.181.000,-	86.224.000,-	98,90
3	Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumbar	50.798.000,-	50.798.000,-	100
4	Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	97.956.000,-	80.996.000,-	82,69
5	KSN Expo dan Award dalam HKS	22.106.000,-	10.183.500,-	46,07



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

6	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	369.973.250,-	349.680.150,-	94,51
7	Penguatan nilai-nilai KSN	133.730.200,-	133.730.200,-	100
8	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se Sumbar dalam rangka Akreditasi	93.930.500,-	79.988.300,-	85,16
9	Penguatan peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	389.425.000,-	265.781.000,-	68,25
10	Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	577.328.926,-	486.315.200,-	84,24
11	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	1.076.376.096,-	769.449.324,-	71,49
12	Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	54.550.000,-	54.550.000,-	100
13	Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	1.463.324.000,-	1.129.293.950,-	77,17
14	Penguatan Peran Pilar Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	361.578.000,-	340.976.000,-	94,30
15	Bimbingan pengurus organisasi Sosial se Sumatera Barat	56.872.000,-	47.832.000,-	84,10
M	Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kessos (PMKS) Lainnya	54.095.239.520,-	49.262.754.163,-	91,07
1	Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	113.314.000,-	110.126.300,-	97,19
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	55.660.905,-	55.360.900,-	99,46
3	Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	105.283.000,-	95.547.200,-	90,75
4	Pelayanan Orang Terlantar	20.618.500,-	20.475.500,-	99,31
5	Sumbar Expo (Publikasi)	227.196.000,-	216.904.609,-	95,47
6	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3	98.763.000,-	93.963.846,-	95,14
7	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	52.322.000,-	52.322.000,-	100
8	Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	156.468.835,-	143.068.500,-	91,44
9	Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	53.545.000,-	46.605.000,-	87,04
11	Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	53.178.715.840,-	48.395.117.908,-	91,00
12	Pembuatan Buku Ddata PMKS dan PSKS	33.352.440,-	33.262.400,-	99,73
N	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	801.444.180,-	777.432.980,-	97,00



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

1	Bantuan logistik bencana	100.917.000,-	100.199.000,-	99,29
2	Rakor Bencana Sosial	83.593.000,-	81.893.000,-	97,97
3	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	66.363.400,-	66.363.400,-	100
4	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam	82.829.200,-	81.843.250,-	98,81
5	Rakor koordinasi program keluarga Harapan	60.535.980,-	60.532.980,-	100
6	Pemantapan tim TRC bencana alam	85.041.200,-	85.040.950,-	100
7	Pemantapan tim psikososial bencana alam	78.291.400,-	78.287.400,-	99,99
8	Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	122.101.500,-	111.701.500,-	91,48
9	Peningkatan Capacity Building Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	121.771.500,-	111.571.500,-	91,62
O	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	9.392.123.209,-	8.858.969.394,-	94,32
1	Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	114.246.000,-	98.552.800,-	86,26
2	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	2.443.441.300,-	2.443.176.300,-	99,99
3	Bimbingan Pemantapan Ppendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	119.553.309,-	93.972.500,-	78,60
4	Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	233.312.700,-	179.253.100,-	76,83
5	Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	3.856.098.900,-	3.731.915.200,-	96,78
6	Penumbuhan Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	328.346.200,-	297.238.550,-	90,53
7	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2019	195.735.300,-	143.279.900,-	73,20
8	Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perdesaan	1.908.675.500,-	1.698.453.044,-	88,99
9	Bimbingan Pemnatapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	86.879.900,-	81.934.600,-	94,31
10	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi BDT Kab/Kota	105.834.100,-	91.193.400,-	86,17
P	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Peyalahgunaan Narkoba	287.410.800,-	284.729.605,-	99,07
1	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	77.454.000,-	77.454.000,-	100
2	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV Bagi PSKS	150.757.300,-	149.557.300,-	99,20



3	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	59.199.500,-	57.718.305,-	97,50
---	--	--------------	--------------	-------

3.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan yang tidak terlaksana realisasi dibawah 70 % sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	22.550.000,-	15.221.087,-	67,50
2	Rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	128.303.500,-	76.365.200,-	59,52
3	KSN Expo dan Award dalam HKS	22.106.000,-	10.183.500,-	46,07
4	Penguatan peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan Kesos	389.425.000,-	265.781.000,-	68,25

Rendahnya realisasi:

- a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan karena adanya mobil jabatan yang tidak memungkinkan/tidak efektif untuk diasuransikan lagi yakni mobil dengan BA 1737 B tahun perolehan 2012.
- b. Rujukan penyandang masalah kesejahteraan karena klient yang mengikuti seleksi banyak tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
- c. KSN Expo dan Award dalam HKS karena tidak mencukupinya dana yang tersedia untuk melaksanakan pameran.



- d. Penguatan peran LKS posdaya penanggulangan Kesos karena tidak mencukupi anggaran untuk peserta dalam melaksanakan kegiatan pertemuan.
2. Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% dimana sisa anggaran merupakan dana yang tidak terpakai/tidak digunakan lagi. Dengan kegiatannya sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	419.071.584,-	371.182.522,-	88,57
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	275.000.000,-	245.068.250,-	89,12
3	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	151.200.000,-	122.018.900,-	80,70
4	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Aset SKPD	207.997.800,-	176.917.488,-	85,06
5	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	50.931.100,-	44.894.100,-	88,15
6	Bimbingan kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	97.956.000,-	80.996.000,-	82,69
7	Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	1.076.376.096,-	769.449.324,-	71,49
8	Pelatihan dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	1.463.324.000,-	1.129.293.950,-	77,17
9	Bimbingan pengurus organisasi se-Sumbar	56.872.000,-	47.832.000,-	84,10
10	Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	53.545.000,-	46.605.000,-	87,04
11	Bimbingan teknis petugas verifikasi dan validasi BDT	114.246.000,-	98.552.800,-	86,26
12	Bimbingan pemantapan pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	119.553.309,-	93.972.500,-	78,60
13	Seleksi dan penghargaan KUBE berprestasi	233.312.700,-	179.253.100,-	76,83
14	Rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA tahun 2019	195.735.300,-	143.279.900,-	73,20
15	Bantuan penumbuhan usaha	1.908.675.500,-	1.698.453.044,-	88,99



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

	melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan			
16	Rapat evaluasi pelaksanaan verifikasi BDT Kab/Kota	105.834.100,-	91.193.400,-	86,17



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan neraca mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD Pengguna Anggaran yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Selama tahun anggaran 2019 Dinas Sosial selaku entitas akuntansi, telah menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif, atas pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berbasis akrual berupa laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.



Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pendapatan adalah semua penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima di Kas umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aktiva dan hutang, yang terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

4.3.1. Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas.

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Tanah.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai

wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan gedung dan bangunan tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

e. Peralatan dan Mesin.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian, meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui kontrak, meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

g. Aset tetap lainnya.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya melalui kontrak, meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
- Nilai buku adalah nilai aset yang tertera pada catatan dan informasi akun dalam daftar aset , biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli.
- Masa mamfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintah dan atau pelayanan publik.
- Metode Penyusutan Aset tetap digunakan dengan metode garis lurus.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos neraca daerah telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Seiring hal tersebut mulai tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset tetap daerah dengan melakukan penyusutan aset tetap. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan pada tahun 2008, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran, berdasarkan Pergub No. 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Sehubungan SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dimana tupoksinya melakukan pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dan merupakan SKPD yang tidak mempunyai pendapatan.

5.1.2. BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

- a. **Belanja Pegawai 21.877.288.419,- 21.157.721.466,- 96,71 19.021.919.068,-**
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 96,71 % dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 719.566.953,- adalah sisa Gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dan tidak terealisasi karena adanya PNS yang pensiun dan meninggal dunia.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp.2.135.802.398,-. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Tambahan penghasilan terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif. Rincian untuk belanja pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

-	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.276.973.466,-	13.725.348.337,-	13.616.062.031,-
-	Belanja Tamb. Pengh PNS	7.600.314.953,-	7.432.373.129,-	5.405.857.037,-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.	7.600.314.953,-	7.432.373.129,-	5.405.857,037,-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	-	-	-
	Jumlah Belanja Pegawai	21.877.288.419,-	21.157.721.466,-	19.021.919.068,-

Saldo/jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2019 sejumlah Rp.719.566.953,- yang terdiri dari :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 551.625.129,-.
- Belanja Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 167.941.824,-.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

b. Belanja Barang & Jasa 85.550.131.900,- 78.621.646.722,- 91,90 45.461.793.578,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 92,32% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.928.485.178,- adalah sisa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak terealisasi karena adanya kegiatan pokok fikiran DPRD yang tidak terlaksana yakni kegiatan Kube Fakir Miskin, ini disebabkan adanya dana yang teranggarkan diperubahan sehingga waktu untuk pelaksanaan tidak mencukupi karena melalui proses tender, disamping itu sisa anggaran yang ada merupakan anggaran dalam proses kegiatan yang tidak dipergunakan lagi. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 33.159.853.144,- terdiri dari :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

-	Belanja Bahan Pakai Habis	10.416.460.939,-	10.309.554.346,-	98,97	9.608.823.254,-
-	Belanja bahan material	581.364.359,-	576.599.010,-	99,18	681.560.010,-
-	Belanja Jasa Kantor	15.814.757.268,-	14.807.283.092,-	93,63	4.832.368.332,-
-	Belanja Premi Asuransi	12.294.950,-	5.992.925,-	48,74	6.000.000,-
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	429.326.634,-	380.410.684,-	88,61	417.126.959,-
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	379.834.350,-	367.650.400,-	96,79	206.708.300,-
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	157.950.000,-	154.750.000,-	97,97	55.500.000,-
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	112.000.000,-	105.600.000,-	94,29	103.960.000,-
-	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	87.800.000,-	86.700.000,-	98,75	61.450.000,-
-	Belanja Makanan dan Minuman	1.588.878.000,-	1.512.421.000,-	95,19	766.309.000,-
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	151.200.000,-	122.018.900,-	80,70	133.153.200,-
-	Belanja Pakaian Kerja	972.860.000,-	775.354.000,-	79,70	188.682.000,-
-	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	341.100.000,-	214.777.850,-	62,97	117.993.250,-
-	Belanja Perjalanan Dinas	5.176.699.400,-	4.254.658.516,-	82,19	2.869.603.613,-
-	Belanja Pemeliharaan	501.047.000,-	495.764.413,-	98,95	174.796.500,-
-	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	131.500.000,-	129.500.000,-	98,48	194.000.000,-
-	Honorarium PNS	761.700.000,-	669.650.000,-	87,92	1.043.900.000,-
-	Honorarium Non PNS	203.840.000,-	203.840.000,-	100	4.159.430.024,-
-	Belanja Jasa Lembaga	30.000.000,-	30.000.000,-	100	-
-	Belanja Jasa Lainnya	0		99,13	61.549.846,-
-	Belanja kelayan/Atlit	1.289.519.000,-	1.250.224.000,-	97,57	1.196.822.500,-
-	Belanja Vakasi/Verifikasi	15.000.000,-	15.000.000,-	100	15.000.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

-	Belanja Bantuan Sosial Barang	46.395.000.000,-	42.153.897.568, -	90,86	-
-	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-		-
	Jumlah	85.550.131.900,-	78.621.646.722,-	91,90	45.461.793.578,-

Khusus mengenai belanja barang jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga yakni belanja bantuan sosial barang sebesar Rp.42.153.897.568,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

No	Kegiatan	Jenis Barang yang Diserahkan	Jumlah (Rp)
I	Belanja Bantuan Sosial Barang terdiri dari:		42.153.897.568,-
1	WRSE : Bimbingan Keterampilan berusaha bagi wanita rawan social ekonomi (bantuan UEP) 15.400 orang		42.153.897.568,-
	- Kab. 50 Kota	Kompore gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, sepatu sepatu boat, Samir, cetakan kerupuk, mesin parut kelapa, seng BJLS, tungku angli, baskom,	5.610.021.830,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

		tampah anyaman, pewarna makanan, garam, gerobak dorong besi,	
	- Agam	Kompore gas, tabung gas, beras, kualii, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	1.130.672.600,-
	- Padang Pariaman	Kompore gas, tabung gas, beras, kualii, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi, dandang besar, beras pulut, mesin cuci, pewangi, kacang kedele	2.824.823.700,-
	- Pesisir Selatan	Kompore gas, tabung gas, beras, kualii, minyak	1.465.151.400,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

		goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	
	- Kab. Sijunjung	Kompore gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender, gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, pupuk urea, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, sepatu boat, gerobak dorong besi	2.393.776.590,-
	- Kab. Solok Selatan	Kompore gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat,	1.791.361.260,-



		gerobak dorong besi	
	- Kota Padang	Kompur gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi. mesin cuci, pewangi pakaian	13.719.804.100,-
	- Kota Payakumbuh	Kompur gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	3.136.729.550,-
	- Kab. Pasaman	Kompur gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan,	6.005.106.900,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

		blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	
	- Kab.Pasaman Barat	Kompore gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	1.498.940.203,-
	- Kab.Solok	Kompore gas, tabung gas, beras, kual, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	1.882.033.310,-
	- Kab.Tanah Datar	Kompore gas, tabung gas,	551.428.700,-

		beras, kualii, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	
	- Kab.Dharmasraya	Kompom gas, tabung gas, beras, kualii, minyak goreng, kulkas, minuman kaleng, minuman mineral botol, etalase makanan, blender gula pasir, susu kaleng, tepung terigu, mie instan, rokok, alat semprot hama metic, racun rumput, pupuk urea, sepatu boat, gerobak dorong besi	594.631.700,-

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2019 sejumlah Rp. 6.928.485.178,-. yang terdiri dari :

- Belanja Bahan Pakai Habis sebesar 106.906.575,-,-.
- Belanja bahan material sebesar 4.765.349,-.
- Belanja Jasa Kantor sebesar 1.007.474.176,-.
- Belanja Premi Asuransi 6.302.025,-.



- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 48.915.950,-.
- Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 12.183.950,-.
- Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir sebesar Rp. 3.200.000,-
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 6.400.000,-.
- Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 1.100.000,-.
- Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 76.457.000,-.
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp. 29.181.100,-
- Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp. 197.506.000,-.
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu sebesar Rp. 126.322.150,-.
- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 922.040.884,-.
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 5.282.587,-.
- Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp.2.000.000,-.
- Honorarium PNS sebesar Rp. 92.050.000,-.
- Belanja kelayan/Atlit sebesar Rp. 39.295.000,-.
- Belanja Bantuan Sosial Barang sebesar Rp. 4.241.102.432,-

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

c. **Belanja Hibah** **11.796.769.500,-** **11.227.079.800,-** **95,17** **0,00,**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 95,17% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja hibah sebesar **Rp. 569.689.700,-** adalah sisa anggaran belanja hibah yang tidak terealisasi sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi atau karena efisiensi anggaran.

Belanja Hibah dapat diuraikan sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

No	Kegiatan	Jenis Barang yang Diserahkan	Jumlah (Rp)
I	Belanja Hibah terdiri dari:		11.202.079.800,-
1	Pengadaan Beras untuk Panti Swasta (Kab.Mentawai,Kab.Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman	121 panti swasta, 4000 orang	2.377.920.000,-
2	Bantuan Pengembangan E-warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM (Kota Padang, Kab.Pasaman Barat, Kota Solok, Kab.Pasaman, Kota Solok, (7 kelompok kota Solok, 140 kelompok, Kab.Pasbar, 20 kelompok Kab.Pasaman)	Kulkas/showcase, minyak goreng kemasan, gula pasir, mie instan, beras,dakron,busa tipis, bahan kain spre, benang jahit, karet, Jilbab, mesin jahit	3.239.329.000,-
3	UEP KUBE FM Perdesaan 730 kk/73 kelompok Kab.Padang Pariaman, Kab.Agam, Kab.Pasaman, Kab.Sijunjung, Kab.Dharmasraya, Kab.Tanah Datar	Kulkas, etalase, beras, gula pasir,minyak goreng kemasan, mie instan, minuman botol, timbangan, susu kental manis, tepung beras, blender, mesin jahit listrik, mesin obras listrik, mesin sari kayo, pompa sparayer literan kapasitas 2l x 1l, gerobak arco, mesin potong rumput, mata	1.405.640.800,-



		pisau potong rumput, mata gerinda, mesin jahit hitam, gunting, almari pendingin, kantong plastik gula, mesin perontok jagung, gerobak dorong, mixer, oven gas, tabung gas	
4	UEP Kube Pesisir dan Kepulauan Kab.Kep.Mentawai 8 kk	Jaring gambolo, tali jaring, timah pelor, pelampung jaring, pelampung boya, jaring tambang, fiber, beras, gula pasir, teh celup bendera, kopi, indomie, sabun crem, sabun mandi, telur ayam ras, minyak goreng kemasan, timbangan duduk, etalase	159.551.000,-
5	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar (PSBR Harapan)	Mesin jahit, bahan keterampilan	307.050.000,-
6	Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui LBK Kota Padang Panjang (200 orang perempuan)	Alat keterampilan menjahit (Benang, gunting,kain,jarum)	45.585.000,-
7	Pendayagunaan para penyandang disabilitas Kota Padang (100 orang)	Tali temali, paralel barr, cermin, wedges, tangga laci, dipan, infra red, korset, grip pensil, menara tabung, rumah geometri, puzzle huruf, puzzle angka, jam, maze, bouler, wire game, timbangan	48.000.000,-



		geometri, kartu huruf, knob, meronce, krayon, cat warna, sempoa, brushing, papan halus kasar, jepitan terapi, lemari, box, kursi, papan tulis, plastisin, montesori, matras, trampolin, keranjang basket, bola	
8	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang disabilitas (50 orang)	Keterampilan massage, tempat tidur, kasur, bantal, sepray, keterampilan shiatsu, handuk	62.315.000,-
9	Bimbingan kapasitas bagi Karang Taruna se- Sumbar	Komputer, printer, meja expo, kertas F4, kertas A4, kursi	3.358.371.400,-
10	Penguatan Nilai-nilai KSN	Juara I, II, II	8.950.000,-
11	Penguatan peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos	19 Kab (640 orang)	12.750.000,-
12	Bantuan Logistik Bencana	Logistik	100.199.000,-
13	Seleksi dan penghargaan KUBE dan pendamping KUBE berprestasi (38 orang pengurus dan pendamping)	Kulkas, mesin jahit, busa cover bad, kamera, printer	16.000.000,-
14	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi anak terlantar UPTD PSAABR Lb. Alung	Alat-alat listrik, alat otomotif, alat elektronika, alat las	60.418.600,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

d. **Belanja Modal 2.444.000.000,- 2.376.227.819,- 97,23 1.809.199.050,-**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 97,23% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja modal sebesar **Rp. 67.772.181,-** adalah sisa anggaran belanja Modal yang tidak terealisasi sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi atau karena efisiensi anggaran.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp 567.028.769,-. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Aset tetap Lainnya.

Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1.	Peralatan dan Mesin	1.160.500.000,-	1.114.345.819,-
	- Pengadaan Alat-alat Bantu	68.850.000,-	68.670.000,-
	- Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	275.000.000,-	245.068.250,-
	- Pengadaan Alat Kantor	30.450.000,-	29.445.800,-
	- Pengadaan Alat Rumah Tangga	197.800.000,-	194.789.150,-
	- Pengadaan Komputer	296.000.000,-	293.045.950,-
	- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	108.300.000,-	107.650.455,-
	- Pengadaan Alat Studio	153.850.000,-	151.132.864,-
	- Pengadaan Alat Komunikasi	4.250.000,-	4.250.000,-
	- Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	26.000.000,-	20.293.350,-
2.	Gedung dan Bangunan	1.148.000.000,-	1.126.682.000,-
	- Pengadaan Gedung Tempat Kerja	998.000.000,-	978.464.000,-
	- Pengadaan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,-	148.218.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	125.000.000,-	124.700.000,-
	- Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	125.000.000,-	124.700.000,-
4.	Aset Tetap Lainnya	10.500.000,-	10.500.000,-
	- Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	10.500.000,-	10.500.000,-

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.160.500.000,-	1.114.345.819,-	96,02	690.817.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 96,02% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp.423.528.819,-. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah	Realisasi 2019
1	Proyektor	1 unit	5.846.500,-
2	Jaringan CCTV	1 unit	24.900.000,-
3	Tempat Sampah Beroda	7 unit	8.004.150,-
4	Mesin Jahit Konveksi	4 unit	20.293.350,-
5	Pembatas Shaf Mushalla	2 unit	5.035.800,-
6	Printer	1 unit	2.483.250,-
7	TV	1 unit	3.500.000,-
8	Jaringan CCTV	1 unit	7.200.000,-
9	AC 1 ½ Pk	1 unit	6.985.000,-
10	AC 1 Pk	4 unit	22.000.000,-
11	Tempat Tidur Besi	3 unit	8.250.000,-
12	Laptop	1 unit	10.000.000,-
13	Stabilizer Besar	1 unit	3.450.000,-
14	Printer Multifungsi	1 unit	4.500.000,-
15	Audio Paging System	1 unit	26.000.000,-
16	Rak Sepatu	8 unit	14.000.000,-
17	Meja Makan	1 unit	2.950.000,-
18	Kursi Tamu	1 unit	6.000.000,-
19	Kursi Tunggu Stainless	2 unit	4.800.000,-
20	Laptop	1 unit	8.800.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

21	Printer	1 unit	2.000.000,-
22	Alarm	2 unit	7.000.000,-
23	Tempat Tidur	2 unit	4.000.000,-
24	Kendaraan Roda Dua	1 unit	21.600.000,-
25	Jaringan CCTV	1 unit	19.767.000,-
26	Sound System	1 unit	19.587.000,-
27	Almari	10 unit	15.000.000,-
28	Mesin Genset	1 unit	39.820.000,-
29	Tempat Tidur Bertingkat	7 unit	38.500.000,-
30	Printer	1 unit	3.998.300,-
31	Komputer	2 unit	23.300.400,-
32	Laptop	2 unit	22.000.000,-
33	Meja Staf	1 unit	16.800.000,-
34	Kursi	6 unit	24.000.000,-
35	AC	1 unit	6.500.000,-
36	Kursi Tamu Pejabat	2 unit	19.550.455,-
37	Proyektor	1 unit	9.996.136,-
38	Sound System	1 unit	48.820.909,-
39	Kamera	1 unit	7.925.114,-
40	Peging System	1 unit	24.957.205,-
41	Mesin Pompa Air	2 unit	10.000.000,-
42	Meja Kerja Pejabat	2 unit	11.000.000,-
43	AC 2 Pk	1 unit	8.500.000,-
44	AC 1 Pk	1 unit	5.500.000,-
45	Mesin Potong Rumput	1 unit	4.000.000,-
46	Kendaraan Roda Dua	5 unit	223.468.250,-
47	Alat Tenis Meja	1 unit	8.000.000,-
48	Komputer	2 unit	23.992.000,-
49	Laptop	3 unit	47.037.000,-
50	Pembatas Shaf Mushalla	1 unit	9.410.000,-
51	Printer Multifungsi	2 unit	8.118.000,-
52	Kursi Esselon IV	3 unit	12.000.000,-
53	Kursi Esselon III	2 unit	10.000.000,-
54	Kursi	1 unit	3.500.000,-
55	Vacum Cleaner	1 unit	10.000.000,-
56	Mesin Penyuling Air	1 unit	10.000.000,-
57	Printer Multifungsi	1 unit	2.500.000,-
58	Printer	1 unit	1.750.000,-
59	Faximile	1 unit	4.250.000,-
60	Tendon Air	3 unit	6.000.000,-
61	Mesin Pompa Air	1 unit	4.850.000,-
62	Mesin Cuci	1 unit	6.600.000,-
63	Komputer	2 unit	24.000.000,-

64	UPS	1 unit	2.500.000,-
65	Printer	1 unit	3.000.000,-
66	TV	1 unit	4.500.000,-
67	Meja Belajar	20 unit	18.000.000,-
67	Kursi Biasa	20 unit	7.000.000,-
68	Kulkas	1 unit	7.000.000,-
69	Laptop	1 unit	12.000.000,-
70	Printer	1 unit	1.750.000,-
71	Printer Multifungsi	1 unit	5.000.000,-
72	Laptop	1 unit	10.000.000,-
73	Komputer	1 unit	12.000.000,-
74	Printer Scanner	1 unit	3.000.000,-
75	Printer Multifungsi	1 unit	4.000.000,-
Jumlah			1.114.345.819,-

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.148.000.000,-	1.126.682.000,-	98,14	1.020.962.050,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 98,14% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat Kenaikan sebesar Rp. 105.719.950,-. Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Realisasi
1	Rehab Mushalla dan Dapur	1 Keg	191.831.000,-
2	Rehab Perpustakaan	1 Keg	173.540.000,-
3	Rehab Wisma	1 Keg	148.218.000,-
4	Rehab Ruang Belajar	1 Keg	199.000.000,-
5	Rehab Ruang Keterampilan	1 Keg	192.739.000,-
6	Rehab WC	1 Keg	32.565.000,-
7	Rehab Jalan dan Wisma	1 Keg	188.789.000,-
Jumlah			1.126.682.000,-



Dari jumlah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadaan gedung kantor terdiri dari 7 unit kegiatan dengan uraian:
 - a. Rehab Mushalla dan Dapur UPTD UPTD PSBN Tuah Sakato.
 - b. Rehab Perpustakaan UPTD UPTD PSBN Tuah Sakato.
 - c. Rehab Wisma UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak.
 - d. Rehab Ruang Belajar UPTD PSTW PBSR Harapan Padang Panjang.
 - e. Rehab Ruang Keterampilan UPTD PSBGHI Padang.
 - f. Rehab WC UPTD PSBGHI Padang.
 - g. Rehab Jalan dan Wisma UPTD PSKW Andam Dewi Solok.

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah **Rp.21.318.000,-** adalah sisa kontrak yang tidak dipergunakan lagi.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
3	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	125.000.000,-	124.700.000,-	99,76	97.420.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 99,76% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat Kenaikan sebesar Rp. 27.280.000,-

Adapun rincian objek belanja modal Jalan,Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Realisasi
1	Perbaikan Sumur Bor	1 Keg	124.700.000,-

Daftar Belanja Modal Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 21



Pengurangan adalah jumlah spj SPJ GU+CP+ Sisa UHYD.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2019	2018 (Audited)
-----------	------	----------------

1. **Setara Kas** 0,00,- 0,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018. Sampai dengan 31 Desember 2018. Pada tahun 2019 dan 2018 tidak terdapatnya Aset Lancar yang setara kas.

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

2. **Beban Dibayar Dimuka** 5.992.925,- 6.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa :
Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 58 Isuzu UCR6Y MU-X R2 (4X2) A/T /MB tahun pembuatan 2017, dengan periode Asuransi tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 27 Desember 2020 sebesar Rp. 5.992.925,-.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Premi Asuransi	6.000.000,-	5.992.925,-	6.000.000,-	5.992.925,-

Penambahan adalah jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan ditahun 2020 yakni sebesar Rp.5.992.925,-.

Pengurangan adalah jumlah beban dibayar dimuka yang telah dibayarkan ditahun 2019 yakni sebesar Rp.6.000.000,-.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

3. **Persediaan** 7.792.325,- 31.912.980,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2019	TAHUN 2018
A.	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	6.900.175	30.977.950
1.	ATK	1.328.500	1.383.800
2.	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	1.392.975	459.450
3.	PERALATAN PEMBERSIH DAN BAHAN PEMBERSIH	986.500	943.200
4.	BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA	3.192.200	28.191.500
B	PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL	847.150	895.030
1	OBAT-OBATAN	847.150	590.800
2	ALAT PRAKTEK	-	304.230
C.	PERSEDIAAN BAHAN DOKUMENTASI/CETAK	45.000	40.000
	JUMLAH	7.792.325	31.912.980

Penambahan dan pengurangan persediaan bahan pakai habis dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	30.977.950	2.827.019.630	2.851.097.405	6.900.175
ATK	1.383.800	193.598.882	193.654.182	1.328.500
Alat Listrik dan Elektronik	459.450	149.138.218	148.204.693	1.392.975
Bahan Pembersih	943.200	199.487.300	199.444.000	986.500
Bahan Pakai Habis lainnya	28.191.500	2.284.795.230	2.309.794.530	3.192.200
PERSEDIAAN BAHAN MATERIAL	895.030	476.523.010	476.570.890	847.150
Obat-Obatan	590.800	122.262.900	122.006.550	847.150
Alat praktek	304.230	354.260.110	354.564.340	-
PERSEDIAAN BAHAN CETAK	40.000	367.650.400	367.645.400	45.000



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

Cetak	40.000	367.650.400	367.645.400	45.000
Jumlah	31.912.980	3.671.193.040	3.695.313.695	7.792.325

Penambahan adalah adanya penambahan belanja di Dinas dan UPTD tahun 2019 yang terdiri dari ATK, Alat listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Bahan Pakai Habis Lainnya, Bahan Obat-Obatan, Alat Praktek dan Bahan Cetak sebesar Rp.3.671.193.040,-

Pengurangan adalah adanya pengurangan kebutuhan ATK dan alat rumah kantor di Dinas dan UPTD yang terdiri dari ATK, Alat listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Bahan Pakai Habis Lainnya, Bahan Obat-Obatan, Alat Praktek dan Bahan Cetak sebesar Rp.3.695.313.695,-

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

1. Tanah	21.690.396.000,-	21.690.396.000,-
----------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp. 21.630.484.000,00

b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 59.912.000,00

Daftar Tanah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	14.843.623.985,49	1.120.263.822,00	166.386.716,64	15.797.501.090,85
Akm Peny Peralatan & Mesin	11.006.246.410,30	1.631.045.535,78	141.386.716,64	12.495.905.229,44
Nilai Buku	3.837.377.575,19	(510.781.713,78)	25.000.000	3.301.595.861,41

Saldo Audited 2018	14.843.623.985,49,-
<u>Mutasi Tambah</u>	1.120.263.822,00,-
Belanja Modal tahun 2019	1.114.345.819,00,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir 2019	0,00,-
Koreksi Saldo Awal	3,00,-
Mutasi antar SKPD	5.918.000,-
<u>Mutasi Kurang</u>	(166.386.716,64,-)
Reklas	141.386.716,64,-
Belanja Barang dan Jasa tidak dikapitalisir 2019	25.000.000,00,-
Total Mutasi	953.877.105,36,-
Saldo per 31 Des 2019	15.797.501.090,85,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.114.345.819,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 3,00.
 - Mutasi antar SKPD dari Biro Aset ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal dua puluh lima bulan April tahun 2019 berupa 2 buah plang nama sebesar Rp. 5.918.000,-
- **Penjelasan Mutasi Kurang**



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

- a) Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisir pada Semester 1 sebesar Rp.25.000.000,-
- b) Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp.141.386.716,64,-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

3. Gedung dan Bangunan **44.655.350.245,-** **43.295.605.245,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 30.608.338.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 14.047.012.245,00

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	43.295.605.245,00,-	1.359.745.000.00,-	0,00,-	44.655.350.245,00,-
Akm Peny Gedung & Bangunan	18.892.755.522,67	932.628.146,64,-	0,00,-	19.825.383.669,31,-
Nilai buku	24.402.849.722,33	427.116.853,36,-	0,00,-	24.829.966.575,69



Saldo Audited 2018	43.295.605.245,-
<u>Mutasi Tambah</u>	1.359.745.000,-
Belanja Modal tahun 2019	1.126.682.000,-
Koreksi Saldo Awal	108.363.000,-
Reklas dari jalan, irigasi & Jaringan	124.700.000,-
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00,-
Saldo per 31 Des 2019	44.655.350.245,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.126.682.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan senilai Rp. 108.363.000,-
- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan senilai Rp. 124.700.000,-,-

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang untuk Gedung dan Bangunan pada tahun 2019

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018(Audited)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00,-	0,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018 .

**1) Dasar Penilaian,**

- a. Neraca Awal 2005 Rp 0,00,-
b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 0,00,-

Daftar Jaringan,Irigasi dan Jaringan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jln Irigasi & Jaringan	0,00,-	124.700.000,-	124.700.000,-	0,00-
Akm Jln Irigasi & Jaringan				
Nilai Buku				

Saldo Audited 2018	0,00,-
<u>Mutasi Tambah</u>	124.700.000,-
Belanja Modal Tahun 2019	124.700.000,-
<u>Mutasi Kurang</u>	124.700.000,-
Reklas ke Gedung dan Bangunan	124.700.000,-
Saldo per 31 Des 2019	0,00,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 124.700.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklas Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 124.700.000,-



Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018(Audited)
5. Aset Tetap Lainnya	637.129.400,00	626.629.400,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 Rp. 637.129.400,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	626.629.400,00	10.500.000,00	-	637.129.400,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	185.602.750,00	44.027.850,00	-	229.630.600,00
Nilai Buku	441.026.650,00	(33.527.850,00)	-	407.498.800,00

Saldo Audited 2018	626.629.400,-
Mutasi Tambah	10.500.000,-
Belanja Modal tahun 2019	10.500.000,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir tahun 2019	0,00,-
Reklas	0,00,-



Mutasi Kurang	0,00,-
Saldo per 31 Des 2019	637.129.400,-

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 10.500.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang untuk Aset Tetap Lainnya pada tahun 2019.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2019	2018(Audited)
6. Aset Tidak Bermanfaat	30.065.200,-	1.483.001.079,51

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tidak Bermanfaat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018 .

1) Dasar Penilaian

- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------|
| a. Neraca Awal 2005 | Rp. | 0,00 |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 2019 | Rp. | 30.065.200,- |

Daftar Aset Lainnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

**2. Mutasi Tambah Kurang**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	1.483.001.079,51	141.386.716,64	1.594.322.596,15	30.065.200,00
Akm Peny Aset Tidak Bermanfaat	1.479.424.356,65	141.386.716,64	1.590.745.873,29	30.065.200,00
Nilai Buku	3.576.722,86		3.576.722,86	0.00

Saldo Audited 2018	1.483.001.079,51,-
<u>Mutasi Tambah</u>	141.386.716,64,-
Belanja Modal tahun 2019	0,00,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir tahun 2018	0,00,-
Reklas dari Peralatan dan Mesin	141.386.716,64,-
<u>Mutasi Kurang</u>	1.594.322.596,15,-
Penghapusan	
Saldo per 31 Des 2019	30.065.200,00,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak bermanfaat per 31 Desember 2019 senilai Rp. 141.386.716,64,-.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.594.322.596,15 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-781-2019. Adapun jenis Peralatan dan Mesin yang dihapuskan dapat dilihat sesuai data yang terlampir.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

- **Akumulasi Penyusutan** **32.580.984.698,75** **29.058.203.958,92**

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(12.495.905.229,44)	(11.006.246.410,30)
- Akumulasi Penyusutan Gdg & Bangunan	(19.825.383.669,31)	(18.892.755.522,67)
- Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan	(0,00)	(0,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(229.630.600,00)	(185.602.750,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(30.065.200,00)	(1.479.424.356,65)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	11.006.246.410,30	1.631.045.535,78	141.386.716,64	12.495.905.229,44
Akm.Gedung dan Bangunan	18.892.755.522,67	932.628.146,64	0,00,-	19.825.383.669,31
Akm.Jln Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Akm Aset Tetap Lainnya	185.602.750,00	44.027.850,00	-	229.630.600,00
Akm.Aset Tidak Bermanfaat	1.479.424.356,65-	141.386.716,64	1.590.745.873,29	30.065.200,00
Jumlah Akm Penyusutan	31.564.029.039,62	2.749.088.249,06	1.732.132.589,79	32.580.984.698,89

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2019 dan 2018.Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan,Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :



Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tidak Bermanfaat
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018 (NERACA Audited)	11.006.246.410,30	18.892.755.522,67	-	185.602.750	1.479.424.356,65
• JUMLAH MUTASITAMBAH:	1.183.600,00	45.512.460,00	-	-	141.386.716,64
• JUMLAH MUTASI KURANG:	141.386.716,64	0,00	-	-	1.590.745.873,29
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018	1.629.861.935,78	887.115.686,64	-	44.027.850	-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 19	12.495.905.229,44	19.825.383.669,31	-	229.630.600	30.065.200,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp.1.183.600,-merupakan mutasi barang dari Biro Aset ke Dinas Sosial provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal dua puluh lima bulan April tahun 2019.
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp.141.386.716,64,- merupakan reklas Peralatan Mesin ke Aset Tidak Bermanfaat.
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.45.512.460,- merupakan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2019.
- Saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp.185.602.750,-
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp. 1.629.861.935,78
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp. 887.115.686,64
- Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya Tahun 2019 sebesar Rp. 44.027.850,-.



Penjelasan Mutasi Kurang:

- a) Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.141.386.716,64,-.
- b) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-781-2019 sebesar Rp.1.590.745.873,15.
- c) Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.0,14,-.

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Tidak Bermanfaat/Aset Lainnya.

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

1. Utang Belanja **Rp. 13.230.506,-** **Rp. 1.139.565.197,-.**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2019 dan 2018 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa. Untuk tahun 2019 dan seterusnya pengakuan utang belanja pegawai berupa tambahan penghasilan tidak dicatat lagi karena adanya perubahan Peraturan dari Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 diubah jadi Peraturan Gubernur No.2 tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang mana pada peraturan tersebut tidak ada lagi pernyataan yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya. Utang belanja barang dan jasa sebesar Rp.13.230.506,-. Penjelasan utang belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Utang Belanja Pegawai**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	1.084.319.814,-	0,-	1.084.319.814,-	0,-

- Pengurangan sebesar Rp. 1.084.319.814,- adalah Utang belanja Pegawai tahun lalu berupa Tambahan Penghasilan PNS yang telah dibayarkan pada tahun 2019.

b. Utang belanja barang dan Jasa Rp 13.230.506,-

Yaitu utang belanja air yang merupakan pemakaian bulan Desember 2019 yang dibayarkan bulan Januari 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan jasa	55.245.383,-	13.230.506,-	55.245.383,-	13.230.506,-

Penambahan sebesar Rp. 13.230.506,- adalah pengakuan air tahun 2019.

Pengurangan sebesar Rp.55.245.383,- adalah utang listrik,telepon,air dan internet tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun 2019.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat dilihat pada Lampiran 13

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

2. Ekuitas Rp. 50.230.011.981,10,- Rp. 49.273.574.453,38,-



Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018. Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas : 49.312.582.673,52
- Surplus/Defisit LO : (112.465.246.499,42)
- RK/PPKD : 113.382.675.807,00
- Jumlah Ekuitas : 50.230.011.981,10

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Koreksi ekuitas dan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN LO

5.3.1 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

a. Beban Pegawai	20.073.401.652,-	19.335.852.361,-
------------------	------------------	------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Uraian	2019	2018(Audited)
Beban Pegawai		
• Gaji dan tunjangan	13.725.348.337,-	13.616.062.031,-
• Tambahan Penghasilan PNS	6.348.053.315,-	5.719.790.330,-
Jumlah	20.073.401.652,-	19.335.852.361,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	13.725.348.337,-	13.725.348.337,-	-
• Tambahan Penghasilan PNS	7.432.373.129,-	6.348.053.315,-	1.084.319.814,-
Jumlah	21.157.721.466,-	20.073.401.652,-	1.084.319.814,-

Penjelasan selisih:

- Pembayaran utang belanja pegawai Tahun 2018 sebesar Rp.1.084.319.814,- yang telah dibayarkan pada Tahun 2019.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Tambahan Penghasilan		1.084.319.814	-		-	1.084.319.814
Jumlah		1.084.319.814	-		-	1.084.319.814

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

b. Beban Barang & Jasa 78.603.759.575,- 45.445.220.018,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Beban LO	Beban Brg&Jasa LO
• Beban Bahan Pakai Habis	10.333.632.139
• Beban Bahan/Material	576.646.890
• Beban Jasa Kantor	14.765.268.215
• Beban Premi asuransi	6.000.000
• Beban perawatan kendaraan	380.410.684
• Beban cetak/pengandaan	367.645.400
• Beban sewa rumah,gedung, ruangan	154.750.000
• Beban sewa mobilitas	105.600.000
• Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor	86.700.000



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

• Beban makan dan minum	1.512.421.000
• Beban pakaian dinas & Atributnya	122.018.900
• Beban pakaian kerja	775.354.000
• Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu	214.777.850
• Beban Perjalanan dinas	4.254.658.516
• Beban pemeliharaan	495.764.413
• Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	129.500.000
• Honorarium PNS	669.650.000
• Honorarium Non PNS	203.840.000
• Beban Belanja jasa lembaga	30.000.000
• Beban Kelayan/Atlit	1.250.224.000
• Beban Vaksinasi/Verifikasi	15.000.000
• Beban bantuan sosial barang diserahkan kepada pihak ketiga	42.153.897.568
Jumlah	78.603.759.575,00

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	10.309.554.364	10.333.632.139	24.077.775
• Belanja Bahan/Material	576.599.010	576.646.890	47.880
• Belanja Jasa Kantor	14.807.283.092	14.765.268.215	(42.014.877)
• Belanja Premi asuransi	5.992.925	6.000.000	7.075
• Belanja perawatan kendaraan	380.410.684	380.410.684	-
• Belanja cetak/pengandaan	367.650.400	367.645.400	(5000)
• Belanja sewa rumah,gedung, ruangan	154.750.000	154.750.000	-
• Beban sewa mobilitas	105.600.000	105.600.000	-
• Belanja sewa perlengkapan dan	86.700.000	86.700.000	-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

peralatan kantor			
• Belanja makan dan minum	1.512.421.000	1.512.421.000	-
• Belanja pakaian dinas	122.018.900	122.018.900	-
• Belanja pakaian kerja	775.354.000	775.354.000	-
• Belanja pakaian kusus	214.777.850	214.777.850	-
• Belanja Perjalanan dinas	4.254.658.516	4.254.658.516	-
• Belanja pemeliharaan	495.764.413	495.764.413	-
• Belanja kusus pelatihan ,sosialisasi dan bimbingan teknis	129.500.000	129.500.000	
• Honorarium PNS	669.650.000	669.650.000	-
• Honorarium non PNS	203.840.000	203.840.000	-
• Belanja Jasa Lembaga	30.000.000	30.000.000	-
• Belanja Vakasi/Verifikasi	15.000.000	1.250.224.000	-
• Belanja Kelayan/Atlit	1.250.224.000	15.000.000	-
• Belanja Bantuan Sosial Barang	42.153.897.568	42.153.897.568	-
Jumlah	78.621.646.722,-	78.603.759.575,-	(17.887.147,-)

Penjelasan selisih:

- a) Penyesuaian Persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Bahan Pakai Habis		6.409.149,-	30.486.924,-		30.486.924,-	6.409.149,-
- ATK		3.274.506,-	3.329.806,-		3.329.806,-	3.274.506,-
- Bahan pembersih		641.500,-	598.200,-		598.200,-	641.500,-
- Pakai habis lainnya		507.400,-	25.506.700		25.506.700	507.400,-
• Alat listrik & elektronik		1.985.743,-	1.052.218,-		1.052.218,-	1.985.743,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2019 AKRUAL

• Bahan Material		1.411.550,-	1.459.430,-		1.459.430,-	1.411.550,-
- Obat-obatan		1.320.950	1.064.600,-		1.064.600,-	1.320.950
- Praktek		90.600	394.830,-		394.830,-	90.600-
• Blj bhn cetak	-	1.000.000,-	995.000,-	-	995.000,-	1.000.000,-
Jumlah					32.941.354,-	8.820.699,-

b). Penyesuaian mengurangi beban barang dan jasa.

- Penyesuaian Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Premi	6.000.000	0,00	0,00	5.992.925	6.000.000	5.992.925

- Penyesuaian pembayaran utang belanja barang dan jasa tahun 2019 berupa Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet dengan rincian sebagai berikut

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Telepon		3.339.701,-				3.339.701,-
• Air		20.116.120,-	13.230.506,-		13.230.506,-	20.116.120,-
• Listrik		30.859.261,-				30.859.261,-
• Internet		930.301,-				930.301,-
Jumlah					13.230.506,-	55.245.383,-

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

c. **Beban Hibah** **11.227.079.800,-** **0,00,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2019 dan 2018. Beban Hibah ini terdiri dari beban Hibah-LO dapat dijelaskan sbb:



Objek Beban LO	Beban Hibah LO
• Beban Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.202.079.800
• Beban Hibah Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000

Perkiraan	2019	2018(Audited)
-----------	------	---------------

d. **Beban Penyusutan** **2.561.005.472,42,-** **2.491.325.080,69,-**

Dan Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2019. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.629.861.935,78,-
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 887.115.686,64,-
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 44.027.850,00,-

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.



Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D,E daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2019
1. Ekuitas awal	: 49.273.574.453,38
2. Koreksi Ekuitas	: 39.008.220,14
3. RK PPKD	: 113.382.675.807,00
4. Surplus/Defisit LO	: (112.465.246.499,42)
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	: (0,00)
6. Ekuitas Akhir	: 50.230.011.981,10

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 49.273.574.453,38,- adalah saldo Ekuitas akhir tahun 2018 berdasarkan Neraca Restatement per 31 Des 2018.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.112.465.246.499,42,- adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2019.
3. RK PPKD sebesar Rp.113.382.675.807,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD Tahun 2019 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 39.008.220,14,-
5. Ekuitas Akhir tahun 2019 sebesar Rp. 50.230.011.981,10 adalah saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019.



5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Beban Dibayar Dimuka
2. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	21.157.721.466,00	20.073.401.652,00	1.084.319.814,-
• Belanja Brg & Jasa	78.621.646.722,00	78.603.759.575,00	17.887.147,-
• Belanja Modal	2.376.227.819,00	-	2.376.227.819,-
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	2.561.005.472,42	(2.561.005.472,42)
Jumlah Beban Operasi			917.429.307,58

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada pasal 11 (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang sosial. Pada pasal 12 Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam kewenangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi..

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sbb :

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas. Pada pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 , Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :



A. Kepala Dinas;

B. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, humas, protokol, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat terdiri dari ;

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Sub. Bagian Program dan Data.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari ;

- Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;
- Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial;
- Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

D. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Penanganan Fakir Miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari ;

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan;

E. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

F. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui sistem panti;

H. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komprehensif. Penerapan pendekatan ini dengan perspektif masalah kesejahteraan sosial dan cara penanganannya. Pada dasarnya permasalahan sosial tidak berdiri sendiri atau ada hubungan atau kausalitas yang dinamis. Oleh karena itu struktur organisasi dan tugas-tugas pokok pada masing-masing bagian tersebut diatas mendiskripsikan saling keterkaitan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.



Fungsi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi sosial merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti oleh bagian teknis operasional. Pada bagian teknis operasional prinsip-prinsip teknis developmental, partisipatif dan preventif yang diemban oleh bagian Pemberdayaan Sosial merupakan upaya pengembangan dan peningkatan modal sosial. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya masyarakat mengalami hambatan-hambatan sehingga potensi dan modal sosial masyarakat tidak berperan optimal. Maka fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan jaminan sosial memberikan layanan kepada masyarakat atas dasar prinsip praktek teknis, kuratif, rehabilitatif dan asistensi.

Dengan pola pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan metode pendekatan komprehensif integratif atau holistik. Artinya, cara pandang dan penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak parsial. Dengan demikian sinergisitas organisasi pada Dinas Sosial sangat perlu dan telah berjalan sejak lama. Sinergitas ini pula diperlukan oleh atas lembaga pelaksana layanan kesejahteraan sosial tingkat Kabupaten/Kota.

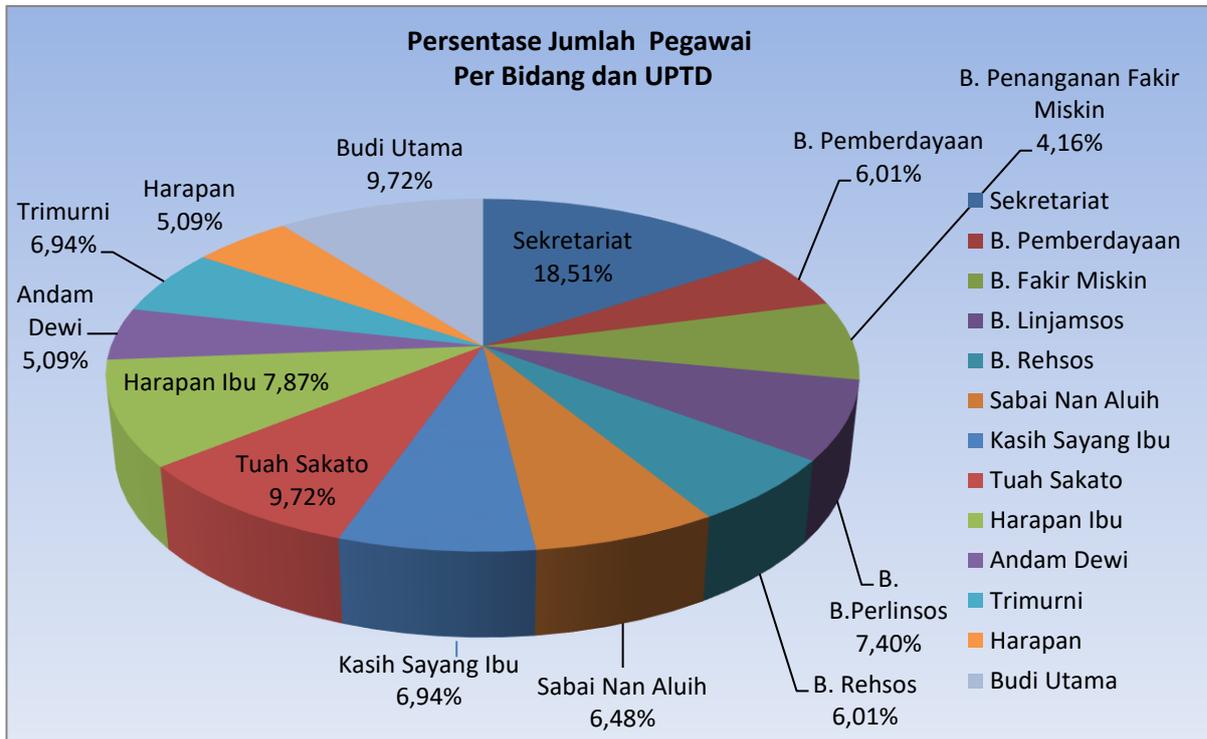
Adapun jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per Desember 2019 berjumlah **216 orang**, dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Pegawai per Bidang dan UPTD

NO	BIDANG	JUMLAH
1	Sekretariat	40 orang
2	Bidang Pemberdayaan Sosial	13 orang
3	Bidang Penanganan Fakir Miskin	9 orang
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	13 orang
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	16 orang
6	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	14 orang
7	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Batu Sangkar	15 orang
8	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang	21 orang
9	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang	17 orang
10	PSKW Andam Dewi Sukarami Solok	11 orang
11	PSAA Trimurni Padang Panjang	15 orang
12	PSBR Harapan Padang Panjang	11 orang
13	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	21 orang
	Jumlah	216 orang

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :

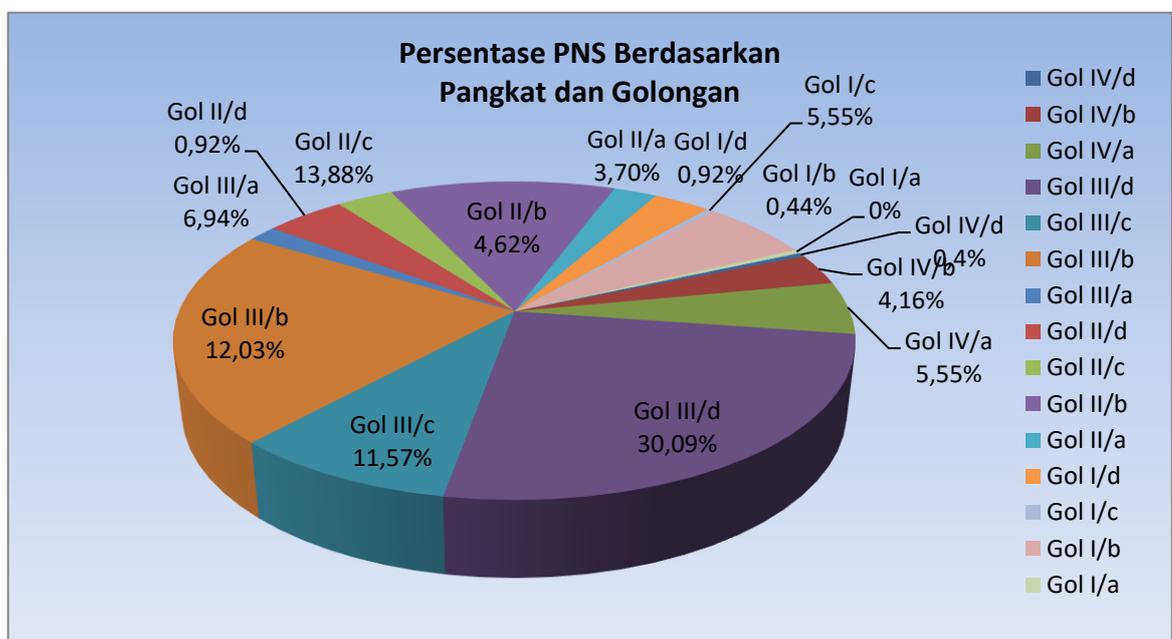


a. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 2.
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I/a	-
2	I/b	-
3	I/c	12 orang
4	I/d	2 orang
5	II/a	8 orang
6	II/b	10 orang
7	II/c	30 orang
8	II/d	2 orang
9	III/a	15 orang
10	III/b	26 orang
11	III/c	25 orang
12	III/d	65 orang
13	IV/a	12 orang
14	IV/b	9 orang
15	IV/c	-
16	IV/d	-
17	IV/e	-
	Jumlah	216 orang

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :

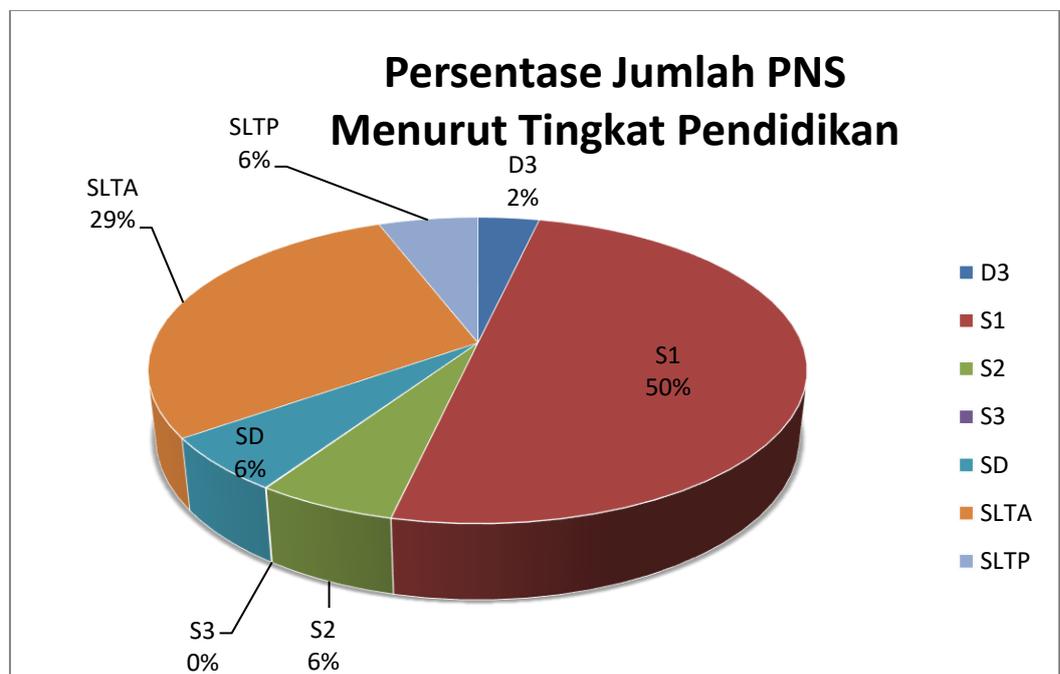


b. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 3.
Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial Prov.Sumbar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	13 orang
2	SLTP	13 orang
3	SLTA	63 orang
4	DIII	5 orang
5	S1	108 orang
6	S2	13 orang
7	S3	1 orang
Jumlah		216 orang

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :





6.3 Aspek Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai SKPD Teknis pada Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas yang cukup berat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Barat.

Daerah Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat rawan bencana seperti longsor, banjir, gempa dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan masyarakatnya terkena musibah/masalah. Salah satunya menyebabkan kehilangan pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain sebagainya yang dapat menyebabkan juga tingkat perekonomiannya menjadi terganggu

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pemerintah yang menangani permasalahan sosial di Sumatera Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya secara wajar sehingga kesejahteraan sosialnya meningkat.

Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja masyarakat. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan dan perundang-undangan. 2. Adanya Aparatur/Sumber Daya Manusia 3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia 4. Adanya dana. 	<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlu disempurnakan. 2. SDM aparatur masih belum profesional dan optimal 3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran tugas. 4. Belum jelasnya sistem pembinaan karir aparatur.
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pembinaan masyarakat dilokasinya dalam meningkatkan fungsi sosialnya/kesejahteraan sosialnya. 2. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu penanganan berbagai permasalahan sosial masyarakat ditengah kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat. 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat untuk membangun dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya. 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani permasalahannya, 3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah (seperti di daerah perkotaan, pedesaan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial

BAB VII**P E N U T U P****7.1 Kesimpulan**

Pada tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dialokasikan 15 (Lima Belas) Program dengan 118 (seratus delapan belas) kegiatan dengan target capaian kinerja telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Dari Jumlah Dana Rp. 121.668.189.819,- terealisasi sebesar Rp. 113.292.911.696,- (Keuangan sebesar 93,19 % dan fisik sebesar 99,75 %), yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 21.877.288.419,- terealisasi sebesar Rp. 21.157.721.466,-(Keuangan sebesar 96,71 % dan Fisik 100 %).
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 99.790.901.400,- terealisasi sebesar Rp. 92.224.954.341,-. (Keuangan sebesar 92,42 % dan Fisik 99,69 %).

Secara total dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, sehingga target fisik capaian kinerja tidak tercapai 100 % seperti yang diharapkan.

Adapun Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 70 % dan 90 % dengan kegiatannya sebagai berikut:

1. Kegiatan yang tidak terlaksana realisasi dibawah 70 % :

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	22.550.000,-	15.221.087,-	67,50
2	Rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	128.303.500,-	76.365.200,-	59,52
3	KSN Expo dan Award dalam HKS	22.106.000,-	10.183.500,-	46,07
4	Penguatan peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan Kesos	389.425.000,-	265.781.000,-	68,25



Rendahnya realisasi:

- a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan karena adanya mobil jabatan yang tidak memungkinkan/tidak efektif untuk diasuransikan lagi yakni mobil dengan BA 1737 B tahun perolehan 2012.
 - b. Rujukan penyandang masalah kesejahteraan karena klient yang mengikuti seleksi banyak tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
 - c. KSN Expo dan Award dalam HKSAN karena tidak mencukupinya dana yang tersedia untuk melaksanakan pameran.
 - d. Penguatan peran LKS posdaya penanggulangan Kesos karena tidak mencukupi anggaran untuk peserta dalam melaksanakan kegiatan pertemuan.
2. Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% dimana sisa anggaran merupakan dana yang tidak terpakai/tidak digunakan lagi. Dengan kegiatannya sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	419.071.584,-	371.182.522,-	88,57
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	275.000.000,-	245.068.250,-	89,12
3	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	151.200.000,-	122.018.900,-	80,70
4	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Aset SKPD	207.997.800,-	176.917.488,-	85,06
5	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	50.931.100,-	44.894.100,-	88,15
6	Bimbingan kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	97.956.000,-	80.996.000,-	82,69
7	Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	1.076.376.096,-	769.449.324,-	71,49
8	Pelatihan dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	1.463.324.000,-	1.129.293.950,-	77,17
9	Bimbingan pengurus organisasi se-Sumbar	56.872.000,-	47.832.000,-	84,10

10	Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	53.545.000,-	46.605.000,-	87,04
11	Bimbingan teknis petugas verifikasi dan validasi BDT	114.246.000,-	98.552.800,-	86,26
12	Bimbingan pemantapan pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	119.553.309,-	93.972.500,-	78,60
13	Seleksi dan penghargaan KUBE berprestasi	233.312.700,-	179.253.100,-	76,83
14	Rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Non Tunai dan RASTRA tahun 2019	195.735.300,-	143.279.900,-	73,20
15	Bantuan penumbuhan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	1.908.675.500,-	1.698.453.044,-	88,99
16	Rapat evaluasi pelaksanaan verifikasi BDT Kab/Kota	105.834.100,-	91.193.400,-	86,17

7.2 Saran

1. Perlunya perencanaan anggaran yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga dalam penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia dan rencana pelaksanaan.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengadaan Barang dan Jasa terhadap pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan, sehingga permasalahan dalam proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar.
3. Perlu penambahan tenaga akuntansi, karena terbatasnya tenaga tersebut sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sedikit mengalami hambatan.

Demikian laporan keuangan ini dibuat semoga bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di tingkat Provinsi, dan bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.